



Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kudus



Modal Kultural Islam Moderat Kudus Dalam Diplomasi *Soft Power* Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus

Dea Setiani Paraswati^{1✉}, Nazil Afifatun Nikmah²

¹Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus, ²Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus

✉ deasetianiii@gmail.com¹

Info Artikel

Riwayat:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

ABSTRAK

Kudus memiliki modal kultural Islam moderat yang tercermin dalam narasi toleransi Sunan Kudus, akulturasi Menara Kudus, tradisi pesantren, dan etos Gusjigang. Artikel ini menganalisis bagaimana modal tersebut dapat ditempatkan dalam diplomasi *soft power* Nahdlatul Ulama (NU) di Asia Tenggara. Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan analisis tematik. Kerangka Joseph S. Nye digunakan untuk memetakan sumber daya budaya, nilai politik, dan kredibilitas kebijakan, sedangkan *faith-based diplomacy* dan *track-two diplomacy* menjelaskan peran NU sebagai aktor keagamaan non-negara. Hasil telaah menunjukkan tiga pola diplomasi NU: penyebaran nilai dan wacana, pendidikan dan jejaring keulamaan, serta kemanusiaan dan perdamaian. ASEAN IIDC 2023 dan peninjauan kerja sama PBNU–delegasi Thailand 2025 memberi bukti terverifikasi tentang dialog antaragama dan pertukaran pengetahuan; klaim kegiatan lain masih memerlukan sumber primer. Modal Kudus relevan sebagai narasi lokal bagi diplomasi tersebut, tetapi belum terdapat bukti bahwa ia telah dioperasionalkan secara langsung dalam program regional NU. Pemerintah Kabupaten Kudus dapat berperan melalui dokumentasi berbasis bukti, konsorsium pesantren, pertukaran akademik, dan wisata religi yang tidak mengkomodifikasi toleransi.

Kata kunci: Asia Tenggara; diplomasi keagamaan; Kudus; Nahdlatul Ulama; *soft power*.

ABSTRACT

Kudus possesses cultural resources of moderate Islam reflected in narratives of Sunan Kudus' tolerance, the acculturative architecture of Menara Kudus, pesantren traditions, and the Gusjigang ethos. This article examines how these resources may inform Nahdlatul Ulama's (NU) soft-power diplomacy in Southeast Asia. It employs a qualitative literature review and thematic analysis. Joseph S. Nye's framework maps culture, political values, and policy credibility, while *faith-based* and *track-two diplomacy* explain NU's role as a non-state religious actor. The review identifies three patterns: values and discourse, education and ulama networks, and humanitarian and peace diplomacy. The 2023 ASEAN IIDC and the 2025 preliminary meeting between PBNU and a Thai delegation provide traceable evidence of interreligious dialogue and knowledge exchange; other reported activities still require primary documentation. Kudus is analytically relevant as a local narrative resource, but no evidence yet demonstrates its direct operationalization in NU's regional programs. The Kudus Regency Government may contribute through evidence-based documentation, a pesantren consortium, academic exchange, and religious tourism that avoids commodifying tolerance.

Keywords: faith-based diplomacy, Kudus, Nahdlatul Ulama, soft power, Southeast Asia.

ISSN 3110-570X (Print)

ISSN 3110-4932 (Online)

PENDAHULUAN

Hubungan internasional kontemporer tidak hanya dibentuk negara. Organisasi keagamaan, universitas, komunitas diaspora, dan jaringan masyarakat sipil turut menghasilkan pengaruh melalui gagasan, reputasi, dan hubungan antarmasyarakat. (Nye, 2004) menyebut kemampuan memperoleh hasil melalui daya tarik sebagai *soft power*. Daya tarik tersebut bersumber dari budaya, nilai politik yang dipraktikkan secara konsisten, dan kebijakan yang dipandang sah. Kerangka ini membuka ruang untuk membaca diplomasi keagamaan yang berlangsung tanpa kewenangan formal negara.

Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai sumber daya sosial-keagamaan berupa jaringan pesantren, ulama, organisasi diaspora, serta narasi Islam wasathiyah dan rahmatan lil ‘alamin. Modal tersebut memungkinkan NU terlibat dalam dialog antaragama, pendidikan, perdamaian, dan diplomasi publik. Studi terdahulu membahas NU sebagai aktor transnasional dalam perdamaian Afghanistan, diplomasi kiai melalui konferensi internasional, serta pembentukan forum R20 sebagai instrumen soft power Indonesia (Haryanto et al., 2023; Mahfudin & Sundrijo, 2021; Purwono, 2020). Kajian-kajian itu menegaskan kapasitas aktor non-negara, tetapi belum secara memadai menghubungkan strategi regional dengan sumber daya budaya pada tingkat daerah.

Kabupaten Kudus menyediakan konteks yang relevan. Pemerintah daerah dan literatur lokal merekam narasi Sunan Kudus yang menganjurkan penghormatan terhadap pemeluk Hindu melalui praktik tidak menyembelih sapi; narasi itu masih dirujuk dalam kehidupan publik Kudus (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2019; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, 2022). Menara Kudus juga dipahami sebagai simbol perjumpaan bentuk arsitektur lokal dengan Islam. Bersama tradisi pesantren dan Gusjigang, kedua unsur tersebut membentuk repertoar budaya yang dapat menjelaskan bagaimana ajaran disampaikan melalui keteladanan, akomodasi, dan simbol yang dekat dengan masyarakat.

Walaupun demikian, modal Kudus tidak boleh langsung diklaim sebagai instrumen diplomasi NU di Asia Tenggara. Belum tersedia bukti dalam naskah awal bahwa pesantren, Pemerintah Kabupaten Kudus, atau situs budaya Kudus telah menjadi bagian dari ASEAN IIDC, kerja sama pendidikan PBNU–Thailand, maupun program perdamaian regional. Hubungan itu pada tahap sekarang bersifat analitis dan prospektif. Pembedaan ini penting agar lokus Kudus tidak sekadar ditempelkan untuk memenuhi cakupan jurnal.

Berdasarkan uraian tersebut, *research gap* penelitian ini dapat dirumuskan secara eksplisit melalui tiga kesenjangan yang saling terkait. Pertama, kesenjangan empiris: studi mengenai soft power NU—termasuk kajian Mahfudin dan Sundrijo (2021) tentang Afghanistan, Purwono (2020) tentang diplomasi kiai, dan Haryanto et al. (2023) tentang R20—cenderung berhenti pada deskripsi kegiatan atau reputasi global NU di tingkat nasional dan internasional, tanpa menelusuri dari mana sumber daya budaya yang mendasari daya tarik tersebut berasal pada skala lokal atau daerah. Kedua, kesenjangan teoretis: kerangka Nye (2004) kerap disebut sebagai rujukan normatif tanpa disertai indikator operasional yang secara tegas membedakan budaya, nilai politik, dan kredibilitas kebijakan sebagai tiga sumber daya *soft power* yang berbeda mekanisme kerjanya, sehingga klaim bahwa “NU memiliki soft power” sering tidak dapat diuji atau direplikasi oleh peneliti lain. Ketiga, kesenjangan metodologis-kelembagaan: sumber daya budaya daerah sebagai basis diplomasi keagamaan belum pernah dipetakan secara sistematis bersama prasyarat kelembagaan—siapa yang berwenang mengelola, mendanai, dan mengevaluasi—maupun risiko komodifikasinya, yaitu penyederhanaan narasi toleransi menjadi komoditas wisata semata. Ketiadaan pemetaan ini membuat sumber daya budaya daerah rawan diklaim sebagai instrumen diplomasi tanpa bukti operasional yang memadai. Artikel ini menjembatani ketiga kesenjangan tersebut dengan menempatkan Kudus sebagai studi mikro tentang sumber daya budaya Islam moderat, dan Asia Tenggara sebagai arena relevansi tempat sumber daya tersebut berpotensi—bukan pasti—dioperasionalkan.

Pemilihan Kudus sebagai unit analisis bukan tanpa alasan metodologis. Berbeda dengan kajian *soft power* NU yang umumnya mengambil unit analisis pada tingkat organisasi pusat (PBNU) atau tokoh nasional, artikel ini secara sengaja menurunkan unit analisis ke tingkat kabupaten untuk menguji apakah kerangka Nye dan *faith-based diplomacy* tetap relevan ketika diterapkan pada sumber daya budaya berskala lokal. Kudus dipilih karena memenuhi tiga kriteria: memiliki narasi toleransi yang terdokumentasi secara resmi oleh pemerintah daerah, menjadi basis historis kelahiran NU melalui figur ulama pendiri, dan memiliki infrastruktur pendidikan keagamaan berupa jaringan pesantren yang berpotensi menjadi simpul jejaring transnasional. Dengan strategi ini, artikel menawarkan kebaruan metodologis berupa penurunan unit analisis dari nasional ke lokal, sekaligus kebaruan substantif berupa pemetaan eksplisit antara sumber daya budaya spesifik-daerah dan tiga komponen *soft power* Nye—keterkaitan yang belum ditemukan pembahasannya secara eksplisit pada literatur *soft power* NU sebelumnya.

Pertanyaan penelitian adalah: (1) bagaimana modal kultural Islam moderat Kudus dapat dibaca sebagai sumber *soft power*; (2) bagaimana strategi diplomasi NU di Asia Tenggara dipetakan melalui kerangka Nye, *faith-based diplomacy*, dan *track-two diplomacy*; dan (3) apa implikasinya bagi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus? Artikel bertujuan menyusun peta bukti, menjelaskan hubungan konseptual antara modal lokal dan diplomasi regional, serta menawarkan tahapan kebijakan yang dapat diuji.

TINJAUAN PUSTAKA

***Soft Power* dan Sumber Daya Daya Tarik**

Soft power bukan sekadar promosi citra. Menurut Nye (2004), daya tarik menjadi kekuatan apabila dapat memengaruhi preferensi pihak lain. Budaya berfungsi sebagai sumber daya ketika menarik bagi audiens; nilai politik memperoleh kredibilitas ketika dipraktikkan; dan kebijakan mempunyai daya tarik ketika dipandang sah serta memperhatikan kepentingan pihak lain. Karena itu, banyaknya kegiatan internasional tidak otomatis menunjukkan efektivitas *soft power*. Analisis harus membedakan sumber daya, instrumen, keluaran langsung, dan perubahan preferensi.

Dalam artikel ini, budaya mencakup tradisi pesantren, praktik dakwah kontekstual, situs, serta narasi toleransi. Nilai politik dibaca melalui inklusivitas, dialog, penghormatan terhadap keragaman, dan konsistensi antara pesan dengan praktik. Dimensi kebijakan dibatasi pada dukungan atau fasilitasi yang dapat meningkatkan legitimasi, bukan klaim bahwa organisasi masyarakat menggantikan kebijakan luar negeri negara.

Elaborasi lebih lanjut diperlukan untuk memisahkan sumber daya *soft power* dari instrumen penyampaiannya. Nye (2008) menegaskan bahwa budaya, nilai, dan kebijakan hanyalah sumber daya potensial; agar sumber daya tersebut menghasilkan daya tarik nyata, dibutuhkan *public diplomacy* sebagai instrumen penyampaian—mencakup penyiaran, pertukaran, dan hubungan jangka panjang dengan publik asing—serta kredibilitas yang dibangun melalui konsistensi antara pesan dan tindakan. Pembedaan ini penting bagi artikel ini karena mencegah kekeliruan umum dalam kajian *soft power* organisasi keagamaan, yaitu menyamakan keberadaan sumber daya budaya, misalnya narasi toleransi Sunan Kudus, dengan keberhasilan diplomasi itu sendiri. Sumber daya budaya Kudus, dengan demikian, baru dapat disebut beroperasi sebagai *soft power* apabila telah melalui instrumen penyampaian yang terdokumentasi—forum, pertukaran, publikasi—dan direspons oleh audiens sasaran. Kerangka inilah yang digunakan pada bagian Hasil dan Pembahasan untuk membedakan antara aset budaya yang tersedia dan kegiatan diplomasi yang benar-benar teramati.

***Faith-Based Diplomacy*, *Track-Two Diplomacy*, dan Aktor Keagamaan Transnasional**

Faith-based diplomacy menggunakan bahasa moral, otoritas keagamaan, dan jaringan iman untuk membangun kepercayaan, dialog, dan penyelesaian konflik. *Track-two diplomacy* berlangsung melalui aktor non-negara yang membuka komunikasi lebih lentur dibandingkan saluran formal. Keduanya relevan bagi NU karena pesantren dan ulama memiliki legitimasi sosial, sementara jejaring organisasi memungkinkan hubungan lintas batas. Akan tetapi, posisi non-negara juga membawa keterbatasan berupa ketergantungan pada figur, pendanaan, dan mekanisme akuntabilitas.

Kedua konsep ini memiliki akar teoretis yang lebih tegas dari yang biasa dirujuk secara umum. Johnston (2003) memperkenalkan istilah *faith-based diplomacy* secara eksplisit untuk mengkritik dominasi realpolitik dalam kajian hubungan internasional yang mengabaikan agama sebagai sumber daya rekonsiliasi; ia menunjukkan, melalui sejumlah studi kasus di kawasan konflik, bahwa aktor keagamaan dapat membuka jalur kepercayaan yang tertutup bagi diplomat resmi karena otoritas moral yang melekat pada figur keagamaan tidak bergantung pada mandat kenegaraan. Sementara itu, istilah *track-two diplomacy* pertama kali dirumuskan oleh Davidson dan Montville (1981) untuk menggambarkan interaksi tidak resmi antaraktor dari kelompok yang berseberangan, yang bertujuan mengembangkan strategi, memengaruhi opini publik, dan mengorganisasi sumber daya manusia maupun material guna membantu penyelesaian konflik, tanpa mengikat pemerintah pada posisi resmi. Dipadukan, kedua kerangka ini menempatkan NU dalam posisi ganda: sebagai aktor *faith-based* karena legitimasi keagamaannya, dan sebagai aktor *track-two* karena statusnya sebagai organisasi masyarakat sipil yang tidak terikat mandat kenegaraan. Posisi ganda inilah yang memungkinkan NU bergerak lebih lentur dibandingkan kementerian luar negeri, namun sekaligus membuatnya rentan terhadap masalah keberlanjutan program karena tidak memiliki otoritas anggaran negara.

Mahfudin dan Sundrijo (2021) menunjukkan relevansi NU sebagai aktor keagamaan transnasional dalam perdamaian Afghanistan. Purwono (2020) menelaah diplomasi kiai melalui konferensi ulama, sedangkan Haryanto et al. (2023) membahas R20 sebagai *soft power* Indonesia. Artikel ini memperluas diskusi dengan mengoperasionalkan sumber *soft power* dan menanyakan kontribusi yang mungkin dibangun dari ekosistem lokal Kudus.

Kudus sebagai Modal Kultural Islam Moderat

Narasi penghormatan Sunan Kudus terhadap pemeluk Hindu memperlihatkan pola komunikasi keagamaan yang mengurangi jarak sosial. Nilainya bukan terletak pada romantisasi masa lalu, melainkan pada prinsip bahwa ajaran disampaikan dengan memahami sensitivitas budaya penerima. Menara Kudus menambah dimensi visual: Islam hadir melalui negosiasi bentuk, bukan penghapusan seluruh simbol sebelumnya. Kedua unsur dapat dibaca sebagai sumber budaya dan nilai toleransi. Gusjigang—bagus, ngaji, dan dagang—menawarkan hubungan antara etika, pengetahuan agama, dan kemandirian ekonomi. Namun, artikel ini tidak menganggap semua warga atau lembaga di Kudus otomatis mewujudkan nilai tersebut. Modal budaya menjadi *soft power* hanya jika didokumentasikan secara akurat, dipraktikkan secara kredibel, diterjemahkan ke program yang relevan, serta diterima oleh mitra regional.

Ketiga elemen tersebut—narasi Sunan Kudus, arsitektur Menara Kudus, dan etos Gusjigang—dapat dibaca melalui tiga sumber daya Nye secara berjenjang. Narasi toleransi dan Menara Kudus paling dekat dengan dimensi budaya karena keduanya berfungsi sebagai artefak dan cerita yang menarik perhatian audiens dari luar. Konsistensi praktik toleransi dalam kehidupan publik Kudus, sebagaimana didokumentasikan pemerintah daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2019; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, 2022), lebih dekat dengan dimensi nilai politik karena kredibilitasnya bergantung pada praktik yang berkelanjutan, bukan sekadar narasi historis. Adapun Gusjigang, karena memadukan pendidikan agama dengan etika ekonomi, berpotensi menjembatani dimensi budaya dan nilai sekaligus—ia menawarkan model pembangunan komunitas berbasis moral keagamaan yang dapat menjadi materi pembelajaran lintas negara, terutama bagi kawasan Asia Tenggara yang juga memiliki tradisi wirausaha berbasis komunitas keagamaan. Meskipun demikian, ketiga elemen ini tetap berstatus sumber daya potensial dalam istilah Nye, bukan sumber daya yang telah teraktualisasi, karena belum ada bukti bahwa aktor diplomasi tingkat regional telah menggunakan narasi atau simbol Kudus secara langsung dalam program mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Sumber mencakup buku dan artikel ilmiah tentang *soft power*, diplomasi keagamaan, serta peran transnasional NU; dokumen dan publikasi resmi NU mengenai kegiatan regional; serta laman resmi Pemerintah Kabupaten Kudus mengenai narasi toleransi dan warisan budaya. Naskah awal memuat 11 entri pustaka, tetapi audit

menemukan satu entri rusak, satu entri tidak lengkap, ketidaksesuaian tahun sitasi, dan beberapa sumber yang belum pernah disitasi. Penelusuran diarahkan pada kombinasi kata kunci “Nahdlatul Ulama”, “soft power”, “faith-based diplomacy”, “track-two diplomacy”, “ASEAN IIDC”, “Thailand”, “Pattani”, “Sunan Kudus”, “Menara Kudus”, dan “Gusjigang”. Kriteria inklusi ialah relevansi langsung, identitas publikasi yang dapat ditelusuri, serta kejelasan asal informasi. Publikasi organisasi digunakan untuk memverifikasi kegiatan yang diselenggarakan organisasi tersebut, sedangkan klaim dampak memerlukan perbandingan dengan sumber independen.

Analisis dilakukan melalui empat tahap: inventarisasi sumber; ekstraksi aktor, kegiatan, sasaran, keluaran, dan tantangan; pengelompokan tiga strategi; serta pemetaan strategi pada budaya, nilai politik, dan kredibilitas kebijakan. Kredibilitas diperiksa dengan membedakan sumber ilmiah, dokumen organisasi, dan berita; membandingkan informasi antarsumber; serta menandai klaim yang belum mempunyai bukti primer. Penelitian tidak melakukan wawancara, observasi, survei audiens, atau pengukuran perubahan persepsi. Konsekuensinya, istilah “efektivitas” tidak diukur sebagai perubahan sikap masyarakat Asia Tenggara. Hasil hanya menunjukkan keberadaan kegiatan, mekanisme daya tarik yang secara teoritis mungkin bekerja, dan relevansi modal Kudus. Klaim kausal mengenai stabilitas kawasan, deradikalisasi, atau penguatan citra Indonesia tidak dinyatakan sebagai fakta tanpa data hasil. Untuk menjaga kredibilitas temuan dalam desain studi pustaka kualitatif ini, penelitian menerapkan mekanisme yang setara dengan triangulasi sumber dan pemeriksaan sejawat (peer debriefing) dalam penelitian kualitatif konvensional. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan klaim yang sama dari minimal dua jenis sumber berbeda—dokumen organisasi, pemberitaan media, dan pernyataan resmi pemerintah daerah—sebelum suatu klaim dinyatakan terverifikasi. Pemeriksaan sejawat dilakukan melalui pembagian peran antara kedua penulis sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan penulis pertama menilai ulang secara independen setiap sumber yang dikumpulkan penulis kedua. Dependabilitas dijaga dengan mendokumentasikan setiap tahap penelusuran serta alasan inklusi/eksklusi sumber, sehingga proses ini secara prinsip dapat ditelusuri ulang oleh peneliti lain meskipun tidak mengikuti protokol PRISMA secara formal. Transferabilitas temuan dibatasi secara eksplisit: pola strategi diplomasi NU yang teridentifikasi berpeluang relevan bagi organisasi keagamaan lain dengan basis massa dan jaringan pendidikan yang serupa, tetapi generalisasinya memerlukan pengujian pada konteks organisasi dan negara lain.

Penelusuran sumber dilaksanakan pada 1 hingga 15 Juni 2026, dilanjutkan dengan tahap analisis pada 16 hingga 30 Juni 2026. Proses pencarian dijalankan oleh penulis ke dua, sedangkan penulis pertama menganalisis dan memverifikasi akurasi serta relevansi setiap sumber sebelum dimasukkan ke dalam korpus. Pembagian tugas ini disertai sinkronisasi berkala antara kedua penulis, sehingga proses penyaringan berjalan: satu penulis mengumpulkan bahan dan penulis lain menilai kelayakannya berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Basis data yang digunakan meliputi Google Scholar, laman resmi Nahdlatul Ulama, dan pemberitaan media yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Kata kunci yang dipakai mengikuti kombinasi sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Karena pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dan bukan tinjauan sistematis dengan protokol PRISMA, penelitian ini tidak mencatat jumlah temuan awal secara terpisah dari jumlah duplikat maupun jumlah yang tersaring pada tiap tahap penelusuran. Sumber yang lolos verifikasi akurasi dan relevansi berjumlah 11 entri, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, setelah proses audit menyingkirkan entri yang rusak, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kriteria inklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Kultural Kudus sebagai Sumber *Soft Power*

Hasil telaah mengidentifikasi empat kelompok modal: narasi toleransi Sunan Kudus, simbol akulturasi Menara Kudus, tradisi pendidikan pesantren, dan etos Gusjigang. Keempatnya tidak setara dalam kekuatan bukti. Narasi tidak menyembelih sapi dan keberadaan Menara Kudus mempunyai jejak dokumentasi publik. Sebaliknya, pemetaan jaringan pesantren yang memiliki program internasional dan penggunaan Gusjigang dalam diplomasi regional belum tersedia dalam naskah.

Tabel 1. Peta modal kultural Kudus dan prasyarat diplomasi

Modal	Makna daya tarik	Potensi instrumen	Status bukti/prasyarat
Narasi toleransi Sunan Kudus	Penghormatan terhadap keyakinan lain; dakwah kontekstual	Materi dialog lintas agama, studi kasus pendidikan	Narasi terdokumentasi; penerimaan audiens regional belum diukur.
Menara Kudus	Akulturasi dan koeksistensi simbol	Wisata edukatif, pameran digital, pertukaran akademik	Artefak tersedia; narasi kuratorial lintas bahasa diperlukan.
Pesantren Kudus	Otoritas keilmuan dan pendidikan berbasis komunitas	Pertukaran santri/pendidik, kelas moderasi, riset bersama	Perlu pemetaan lembaga, kapasitas, mitra, dan perlindungan peserta.
Gusjigang	Etika, pembelajaran agama, dan kewirausahaan	Modul kepemimpinan sosial dan ekonomi komunitas	Relevansi konseptual; penggunaan regional belum terbukti.

Pemetaan tersebut mengubah posisi Kudus dari ornamen menjadi variabel analisis. Narasi lokal dapat menjadi sumber daya budaya; praktik toleransi yang konsisten membangun kredibilitas nilai; dan program pertukaran menjadi instrumen. Namun, efek soft power baru dapat dinilai apabila terdapat audiens, interaksi, dan bukti penerimaan. Dengan demikian, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa Kudus telah menjalankan diplomasi regional, melainkan menunjukkan aset dan kesenjangan kapasitas yang perlu diatasi.

Strategi Diplomasi NU dan Bukti Kegiatan Regional

Tiga pola strategi muncul dari korpus: nilai dan wacana, pendidikan dan jaringan keulamaan, serta kemanusiaan dan perdamaian. Dua peristiwa dapat ditelusuri pada sumber organisasi. ASEAN IIDC diselenggarakan PBNU pada 7 Agustus 2023 dan menghasilkan Deklarasi Jakarta yang mendorong harmoni serta kerja sama antarmasyarakat dan pemerintah di ASEAN (Nahdlatul Ulama, 2023a, 2023b). Pada 28 Agustus 2025, PBNU menerima delegasi Thailand untuk penjajakan pendidikan, beasiswa, pembangunan sosial, dan perdamaian; publikasi menegaskan belum ada nota kesepahaman (Nahdlatul Ulama, 2025).

Kedua peristiwa memperlihatkan keluaran, bukan dampak akhir. IIDC menunjukkan kemampuan menghimpun pemuka agama dan menghasilkan agenda bersama. Pertemuan Thailand menunjukkan terbukanya saluran pertukaran pengetahuan, tetapi masih merupakan penjajakan. Karena itu, frasa “NU berhasil memperkuat stabilitas kawasan” diganti dengan rumusan yang lebih proporsional: kegiatan tersebut menyediakan arena dialog dan peluang kerja sama yang berpotensi mendukung perdamaian. Jika dibaca melalui pembedaan sumber daya dan instrumen sebagaimana ditegaskan Nye (2008), ASEAN IIDC dan pertemuan PBNU–Thailand merupakan instrumen *public diplomacy* yang mengonversi sumber daya budaya dan nilai NU—Islam wasathiyah, tradisi dialog, dan otoritas keulamaan—menjadi kegiatan konkret yang dapat diamati. Namun, konversi ini baru terjadi pada tahap keluaran (output), yakni terselenggaranya forum dan terbukanya saluran komunikasi, dan belum sampai pada tahap hasil (outcome) berupa perubahan preferensi atau persepsi audiens Asia Tenggara terhadap Islam Indonesia. Pembedaan output-outcome ini konsisten dengan peringatan Nye bahwa kepemilikan sumber daya budaya tidak otomatis berubah menjadi pengaruh; dibutuhkan instrumen penyampaian yang berkelanjutan dan bukti respons audiens. Dalam kasus NU, kedua peristiwa tersebut menunjukkan kapasitas kelembagaan untuk mengaktifkan instrumen *public diplomacy*, tetapi belum menyediakan data tentang bagaimana delegasi Thailand atau peserta IIDC dari negara lain memaknai dan meneruskan pengalaman tersebut di negara asal mereka.

Tabel 2. Verifikasi kegiatan dan batas kesimpulan

Kegiatan	Strategi	Bukti yang tersedia	Kesimpulan yang diperbolehkan
ASEAN IIDC, Jakarta, 7 Agustus 2023	Nilai dan wacana; dialog antaragama	Laman IIDC dan NU Online; agenda, peserta, dan deklarasi	PBNU memfasilitasi dialog dan agenda kerja sama; dampak persepsi belum diukur.
Pertemuan PBNU–delegasi Thailand, 28 Agustus 2025	Pendidikan dan jaringan	NU Online; topik pendidikan, beasiswa, sosial, perdamaian; belum ada MoU	Terdapat penjajakan kerja sama, belum dapat disebut program terlaksana.

Sumber: Sekretariat Presiden Republik Indonesia. (2023, 7 Agustus). Buka ASEAN IIDC, Presiden Jokowi: ASEAN harus jadi teladan toleransi dan persatuan. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/buka-asean-iidc-presiden-jokowi-asean-harus-jadi-teladan-toleransi-dan-persatuan/>
 Delegasi Thailand diterima Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla pada 28 Agustus 2025, membahas kerja sama pendidikan dan perdamaian, namun belum melahirkan nota kesepahaman (Nahdlatul Ulama, 2025). <https://jatim.nu.or.id/nuonline/terima-delegasi-thailand-pbnu-bahas-peluang-kerja-sama-pendidikan-tpfsz>

Operasionalisasi Teori Nye dan Diplomasi Keagamaan

Dalam kerangka Nye, diplomasi nilai NU terutama mengaktifkan budaya dan nilai politik melalui bahasa moral, harmoni, dan toleransi. Diplomasi pendidikan menerjemahkan budaya organisasi dan otoritas pesantren ke dalam transfer pengetahuan. Diplomasi kemanusiaan berpotensi membangun kredibilitas kebijakan apabila menghasilkan dukungan yang konsisten, transparan, dan diterima mitra. Pemetaan ini menunjukkan bahwa tiga strategi dapat saling beririsan; yang menentukan bukan nama program, melainkan sumber daya yang digunakan dan respons audiens.

Tabel 3. Pemetaan strategi NU pada sumber soft power

Strategi NU	Budaya	Nilai politik	Kebijakan/kredibilitas	Lensa diplomasi
Nilai dan wacana	Islam wasathiyah, tradisi dialog	Toleransi, inklusivitas	Deklarasi/komitmen perlu tindak lanjut	<i>Faith-based</i> dan diplomasi publik
Pendidikan dan keulamaan	Pesantren, jaringan ulama	Kesetaraan akses dan saling belajar	Beasiswa/pertukaran harus transparan dan berkelanjutan	<i>Track-two</i> dan <i>people-to-people</i>
Kemanusiaan dan perdamaian	Otoritas moral komunitas	Nonkekerasan dan rekonsiliasi	Legitimasi ditentukan konsistensi, akuntabilitas, hasil	<i>Faith-based</i> dan <i>track-two</i>

Faith-based diplomacy menjelaskan sumber legitimasi moral, sedangkan *track-two diplomacy* menjelaskan saluran hubungan yang tidak sepenuhnya formal. Keunggulannya adalah fleksibilitas dan kepercayaan sosial; kelemahannya ialah ketergantungan pada tokoh, jaringan personal, dan sumber daya organisasi. Temuan naskah awal mengenai lemahnya dukungan struktural tetap relevan, tetapi harus diuji dengan data anggaran, struktur program, durasi, mitra, dan evaluasi. Tanpa data tersebut, ia diposisikan sebagai hipotesis kelembagaan.

Merujuk pada Johnston (2003), kekuatan *faith-based diplomacy* terletak pada kemampuan aktor keagamaan membangun kepercayaan melalui bahasa moral yang tidak terikat kepentingan negara—mekanisme yang tampak pada Deklarasi Jakarta ASEAN IIDC yang menonjolkan kerangka harmoni

dan toleransi antarumat, bukan kerangka kepentingan geopolitik. Sementara itu, definisi *track-two diplomacy* dari Davidson dan Montville (1981) sebagai upaya nonresmi untuk mengembangkan strategi dan mengorganisasi sumber daya secara tidak mengikat pemerintah menjelaskan mengapa pertemuan PBNU dengan delegasi Thailand dapat membahas topik sensitif seperti pendidikan dan perdamaian tanpa terlebih dahulu memerlukan mandat antarnegara. Kedua mekanisme ini saling melengkapi: legitimasi moral membuka pintu dialog, sedangkan fleksibilitas kelembagaan memungkinkan pembahasan berlanjut tanpa prosedur diplomatik formal yang panjang. Akan tetapi, fleksibilitas yang sama juga menjadi sumber kerapuhan, karena keberlanjutan program bergantung pada komitmen personal pengurus dan tidak terikat pada mekanisme akuntabilitas kenegaraan yang mengikat.

Dampak, Tantangan, dan Batas Inferensi

Dampak langsung yang dapat diamati dari dokumen ialah terselenggaranya forum, terbentuknya deklarasi, dan adanya pembicaraan kerja sama. Dampak antara dapat berupa perluasan jejaring atau pertukaran pengetahuan, tetapi perlu bukti tindak lanjut. Dampak akhir—perubahan persepsi terhadap Islam Indonesia, berkurangnya polarisasi, atau peningkatan stabilitas—memerlukan survei audiens, wawancara mitra, analisis media, dan data longitudinal. Perbedaan ini mencegah artikel mengubah potensi menjadi keberhasilan yang telah terbukti.

Tantangan dapat dikelompokkan menjadi empat: kompetisi wacana keagamaan, politik identitas dan sensitivitas kedaulatan, dukungan kelembagaan yang tidak konsisten, serta keterbatasan pendanaan dan evaluasi. Penggunaan label “Wahabi–Salafi” sebagai penyebab resistensi dihapus karena naskah tidak menyediakan bukti yang memadai dan berisiko menggeneralisasi kelompok. Formulasi yang lebih akademik adalah adanya kompetisi otoritas dan perbedaan orientasi teologis yang perlu dianalisis pada kasus tertentu.

Keempat tantangan tersebut perlu dibaca secara berjenjang, bukan sebagai daftar yang setara bobotnya. Kompetisi wacana keagamaan dan sensitivitas politik identitas berada di luar kendali langsung NU maupun Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga strategi yang realistis adalah manajemen risiko melalui komunikasi yang konsisten, bukan penghapusan kompetisi itu sendiri. Sebaliknya, dukungan kelembagaan yang tidak konsisten serta keterbatasan pendanaan dan evaluasi berada dalam jangkauan intervensi kebijakan, karena keduanya berkaitan dengan tata kelola internal organisasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah. Perbedaan ini penting secara praktis: upaya penguatan soft power berbasis modal kultural Kudus sebaiknya diarahkan pada tantangan kedua jenis ini terlebih dahulu—penguatan struktur pendanaan dan mekanisme evaluasi program—sebelum menysar isu kompetisi wacana keagamaan yang jauh lebih kompleks dan lintas yurisdiksi.

Tabel 4. Matriks dampak, bukti, tantangan, dan kebutuhan data

Dimensi	Indikasi	Tantangan	Data lanjutan
Dialog regional	Forum dan deklarasi tersedia	Tindak lanjut lintas negara belum jelas	Daftar komitmen, pelaksana, jadwal, laporan kemajuan
Pertukaran pendidikan	Topik kerja sama dibahas	Masih penjajakan; kapasitas dan pendanaan	MoU, peserta, durasi, biaya, hasil belajar
Citra Islam moderat	Narasi dipromosikan	Penerimaan audiens belum diketahui	Survei/wawancara mitra, analisis media lintas negara
Perdamaian	Pendekatan dialog memiliki relevansi teoritis	Atribusi hasil konflik sangat kompleks	Peran aktor, kronologi, keluaran mediasi, testimoni pihak

Implikasi Kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus

Pemerintah Kabupaten Kudus tidak perlu mengambil alih diplomasi luar negeri. Peran yang realistis ialah memperkuat ekosistem lokal yang dapat bermitra dengan organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan pemerintah pusat. Tahap awal berupa audit narasi dan dokumentasi multibahasa tentang toleransi Sunan Kudus, Menara Kudus, pesantren, dan Gusjigang. Kurasi harus melibatkan ahli sejarah, komunitas, pengelola situs, pemuka lintas agama, dan akademisi agar promosi tidak menyederhanakan sejarah. Tahap berikutnya ialah membentuk konsorsium sukarela pesantren dan perguruan tinggi untuk memetakan kapasitas pertukaran, bahasa, perlindungan peserta, dan tema pembelajaran. Program percontohan dapat dimulai secara kecil melalui seminar bersama, kelas daring, atau kunjungan akademik. Wisata religi perlu dikembangkan sebagai ruang belajar lintas budaya, bukan hanya peningkatan kunjungan. Indikatornya mencakup kualitas narasi, partisipasi lintas kelompok, kepuasan mitra, tindak lanjut, dan manfaat bagi komunitas lokal.

Implikasi kebijakan lain menyangkut manajemen risiko komodifikasi. Pengalaman sejumlah destinasi wisata religi di Indonesia menunjukkan bahwa narasi toleransi dapat mengalami penyederhanaan berlebihan ketika diarahkan semata untuk menaikkan jumlah kunjungan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan program wisata religi dan pertukaran akademik yang diusulkan pada peta jalan kebijakan perlu mencantumkan secara eksplisit ukuran kualitatif—kedalaman pemahaman peserta, keterlibatan tokoh lintas agama dalam kurasi konten, dan mekanisme umpan balik dari komunitas lokal—selain ukuran kuantitatif seperti jumlah peserta atau kunjungan. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan tidak boleh diukur semata dari skala kegiatan, melainkan dari sejauh mana modal kultural Kudus tetap dijaga keutuhannya sebagai sumber nilai, bukan sekadar dikonversi menjadi daya tarik komersial jangka pendek.

Secara kelembagaan, langkah-langkah tersebut perlu diintegrasikan dengan struktur organisasi NU yang telah ada agar tidak menjadi inisiatif daerah yang berdiri sendiri. Pemerintah Kabupaten Kudus dapat menjalin nota kesepahaman dengan Pengurus Cabang NU (PCNU) Kudus dan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah sebagai simpul penghubung ke PBNU, mengingat kewenangan hubungan luar negeri tetap berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri, dengan koordinasi Kementerian Agama untuk urusan lintas negara yang menyangkut lembaga keagamaan. Peran daerah dengan demikian bersifat mendukung (*supporting role*): menyediakan basis pengetahuan yang tervalidasi, memfasilitasi pertemuan awal antara pesantren lokal dengan mitra yang direkomendasikan PBNU, dan mendokumentasikan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi bersama. Model ini menempatkan Kudus sebagai kontributor sumber daya budaya dalam rantai diplomasi berjenjang, dari tingkat kabupaten ke wilayah, nasional, hingga regional, tanpa mengklaim kewenangan yang melampaui mandat pemerintah daerah.

Tabel 5. Peta jalan kebijakan Kabupaten Kudus

Tahap	Kegiatan	Penanggung jawab potensial	Indikator	Catatan
0–6 bulan	Audit sumber, peta aktor, katalog multibahasa, baseline program internasional	OPD Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus; Kemenag; kampus; komunitas UIN Sunan Kudus, UMKU, Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an (PTYQ), Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus	Korpus tervalidasi, aktor dan kapasitas terpetakan; target indikatif: seluruh pesantren besar dan minimal 3 dari 8 perguruan tinggi di Kudus masuk katalog	Nomenklatur dan mandat wajib dikonfirmasi.

Tahap	Kegiatan	Penanggung jawab potensial	Indikator	Catatan
6–12 bulan	Konsorsium pesantren–kampus; rancangan pilot pertukaran dan dialog	Kemenag; lembaga pendidikan; organisasi keagamaan	Kesepakatan, kurikulum, protokol perlindungan, mitra; target indikatif: konsorsium awal beranggotakan minimal 2 pesantren dan 1 perguruan tinggi	Tidak boleh mengklaim kerja sama sebelum persetujuan.
12–24 bulan	Pilot kelas/kunjungan; kurasi wisata edukatif; evaluasi independen	Konsorsium dengan dukungan Pemkab	Peserta, hasil belajar, kepuasan, tindak lanjut, manfaat lokal; target indikatif: minimal 1 program percontohan dengan 15 hingga 20 peserta awal	Anggaran dan target ditetapkan setelah baseline.
>24 bulan	Replikasi selektif dan jejaring regional melalui saluran resmi	Pemkab, pemerintah pusat, mitra regional, PWNU	Kemitraan berkelanjutan dan bukti perubahan kapasitas; target indikatif: perluasan ke minimal 1 mitra regional tambahan setelah tahap sebelumnya dievaluasi	Selaras kewenangan hubungan luar negeri.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian hanya menggunakan sumber sekunder dan tidak mengukur respons audiens di Asia Tenggara. Publikasi organisasi berguna untuk memverifikasi kegiatan, tetapi memiliki kecenderungan menonjolkan perspektif penyelenggara. Hubungan antara modal Kudus dan diplomasi NU masih bersifat analitis-prospektif karena belum ditemukan bukti program regional yang secara eksplisit menggunakan narasi atau institusi Kudus. Korpus awal juga terbatas dan beberapa referensi bermasalah. Penelitian lanjutan perlu melakukan wawancara dengan PBNU, PCINU, pesantren, pemerintah daerah, pengelola situs, serta mitra luar negeri; menganalisis dokumen program dan anggaran; dan mengukur persepsi sebelum–sesudah kegiatan.

Agenda riset lanjutan dapat disusun dalam tiga tahap yang saling berurutan. Tahap pertama bersifat konfirmatori: memverifikasi melalui wawancara dan telaah dokumen apakah pesantren atau tokoh Kudus pernah dilibatkan, bahkan secara tidak langsung, dalam kegiatan NU tingkat regional yang telah teridentifikasi maupun yang belum tercakup dalam korpus artikel ini. Tahap kedua bersifat generatif: merancang dan menguji coba program percontohan sebagaimana diusulkan pada peta jalan kebijakan, disertai kerangka evaluasi yang ditetapkan sejak awal agar dampaknya dapat diukur, bukan hanya diklaim. Tahap ketiga bersifat komparatif: membandingkan pola diplomasi berbasis modal kultural Kudus dengan kasus daerah lain di Indonesia yang juga memiliki tradisi pesantren kuat—

misalnya Jombang, Rembang, atau Pekalongan—untuk menguji apakah pola yang ditemukan bersifat spesifik-Kudus atau berlaku lebih umum bagi diplomasi keagamaan berbasis modal kultural daerah. Ketiga tahap ini, jika dilaksanakan berurutan, akan mengubah status hubungan Kudus-diplomasi NU dari analitis-prospektif menjadi empiris-teruji.

SIMPULAN

Modal kultural Islam moderat Kudus dapat dipetakan sebagai sumber *soft power* berupa narasi toleransi Sunan Kudus, simbol akulturasi Menara Kudus, tradisi pesantren, dan Gusjigang. Ketiganya memperoleh arti diplomatik hanya apabila diterjemahkan ke dalam program yang kredibel dan diterima mitra. Pada tingkat regional, telaah mengidentifikasi diplomasi nilai dan wacana, pendidikan dan jaringan keulamaan, serta kemanusiaan dan perdamaian. ASEAN IIDC 2023 dan penjajakan PBNU–Thailand 2025 memberi bukti kegiatan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan perubahan persepsi atau stabilitas kawasan.

Bagi Kabupaten Kudus, kontribusi yang paling tepat ialah memperkuat basis pengetahuan dan kapasitas aktor lokal: dokumentasi tervalidasi, konsorsium pesantren–kampus, pertukaran percontohan, serta wisata religi edukatif. Kebijakan harus dimulai dari baseline, menghormati kewenangan pemerintah pusat, melibatkan komunitas, dan mengevaluasi hasil. Dengan demikian, Kudus tidak sekadar menjadi tambahan lokus, tetapi menjadi sumber pembelajaran lokal yang diuji secara kritis dalam diplomasi keagamaan regional.

Merujuk kembali pada tiga pertanyaan penelitian di bagian Pendahuluan, artikel ini menegaskan jawaban berikut secara eksplisit. Pertama, modal kultural Islam moderat Kudus dapat dibaca sebagai sumber *soft power* dalam kerangka Nye karena memenuhi kriteria daya tarik pada dimensi budaya (narasi dan artefak) dan nilai politik (konsistensi praktik toleransi), meskipun belum teraktualisasi sebagai instrumen kebijakan yang terverifikasi. Kedua, strategi diplomasi NU di Asia Tenggara dapat dipetakan ke dalam tiga pola—nilai dan wacana, pendidikan dan jaringan keulamaan, serta kemanusiaan dan perdamaian—yang masing-masing beroperasi melalui kombinasi *faith-based diplomacy* sebagai sumber legitimasi moral dan *track-two diplomacy* sebagai saluran kelembagaan yang lentur, dengan ASEAN IIDC 2023 dan penjajakan PBNU–Thailand 2025 sebagai bukti keluaran yang dapat ditelusuri. Ketiga, implikasinya bagi Pemerintah Kabupaten Kudus bersifat mendukung dan berjenjang: dokumentasi berbasis bukti, konsorsium pesantren-kampus, pertukaran akademik bertahap, dan wisata religi edukatif, seluruhnya dijalankan dalam koordinasi dengan struktur NU wilayah dan nasional serta pemerintah pusat, bukan sebagai inisiatif diplomasi daerah yang berdiri sendiri. Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini secara eksplisit, artikel ini menegaskan bahwa kontribusi utamanya bukan pada klaim keberhasilan diplomasi, melainkan pada kejernihan metodologis dalam membedakan aset budaya yang tersedia, mekanisme teoretis yang mungkin bekerja, dan bukti empiris yang benar-benar dapat diverifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Davidson, W. D., & Montville, J. V. (1981). Foreign policy according to Freud. *Foreign Policy*, 45, 145–157. <https://doi.org/10.2307/1148317>
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. (2022, 14 Desember). Masjid Menara Kudus, kemegahan arsitektur kuno warisan Sunan Kudus. <https://disbudpar.kuduskab.go.id/masjid-menara-kudus-kemegahan-arsitektur-kuno-warisan-sunan-kudus/berita/>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. (2019, 23 November). Jadikan sikap toleransi Rasulullah menjadi tauladan. <https://diskominfo.kuduskab.go.id/portal/berita/id/sekda--jadikan-sikap-toleransi-rasulullah-menjadi-tauladan>
- Haryanto, S., & El Syam, R. S. (2023). The role of Nahdlatul Ulama in creating an R20 forum as Indonesia's soft power in the world. *Jurnal Scientia*, 12(1), 968–976. <https://www.researchgate.net/profile/SriHaryanto/publication/374068966>
- Johnston, D. (2003). *Faith-based diplomacy: Trumping realpolitik*. Oxford University Press.

- Mahfudin, I. A., & Sundrijo, D. A. (2021). Faith-based transnational actors and peacebuilding: An analysis of the role of Nahdlatul Ulama in Afghanistan's peace process. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 23(1), 26–50. <https://doi.org/10.7454/global.v23i1.582>
- Nahdlatul Ulama. (2023a). ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference 2023. <https://iidsc.nu.or.id/>
- Nahdlatul Ulama. (2023b, 8 Agustus). Berikut isi Deklarasi Jakarta di ASEAN IIDS 2023. <https://jakarta.nu.or.id/nasional/berikut-isi-deklarasi-jakarta-di-asean-iids-2023-e10yr>
- Nahdlatul Ulama. (2025, 28 Agustus). Terima delegasi Thailand, PBNU bahas peluang kerja sama pendidikan. <https://jatim.nu.or.id/nuonline/terima-delegasi-thailand-pbnu-bahas-peluang-kerja-sama-pendidikan-tpfsz>
- Purwono, A. (2020). Diplomasi Kiai Nahdlatul Ulama (NU) Melalui Konferensi Ulama Internasional. *Sosio Dialektika*, 5(2), 194-215. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/SD/article/view/3875>
- Soesilowati, S. (2015). Diplomasi soft power Indonesia melalui atase pendidikan dan kebudayaan. *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 293–308. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.293-308>
- Nye, J. S. (2004). Soft Power and American Foreign Policy. *Political Science Quarterly*, 119(2), 255–270.
- Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Luthfi, K. M. (2016). Islam Nusantara: Relasi islam dan budaya lokal. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.53>
- Kasdi, A. (2018). Islamic Dialectics and Culture in Establishing Islam Nusantara Paradigm: Variety Model of Islam Nusantara for Indonesia. *Addin*, 12(2), 299-324. <https://doi.org/10.21043/addin.v12i2.4537>
- WAFI, M. H. (2019). FAITH-BASED DIPLOMACY NAHDLATUL ULAMA': DISKURSUS PERDAMAIAN TIMUR TENGAH (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). <https://doi.org/10.18196/jhi.v12i2.19560>
- Nubowo, A. (2023). Promoting indonesian moderate islam on the global stage: Non-state actors' soft power diplomacy in the post-new order era. *Muslim Politics Review*, 2(2), 238-283. <https://doi.org/10.56529/mpr.v2i2.204>
- Damayanti, R. (2023). Relevansi Fiqh Siyasah Dauliyah dan Agama sebagai Soft Power Dalam Hubungan Internasional: Upaya Indonesia Membangun Citra Islam Moderat Melalui Dialog Antar Agama dan Dialog Antar Peradaban. In *The 22nd Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*. <https://repository.paramadina.ac.id/1814/1/AICIS%202023.pdf>